

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA LUBUK AMBACANG KECAMATAN HULU KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**HERJUN RUANDA
NPM. 200411027**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA LUBUK AMBACANG
KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : HERJUN RUANDA
8NPM : 200411027
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



SARJAN, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PEMBIMBING II



SAHRLMUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 10211179061008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal 13
Bulan : September
Tahun 2024

TIM PENGUJI

Ketua,



RIKA RAMADHANTI, S.J.P., M.Si

NIDN. 1030058402

Sekretaris,



ALSAR ANDRI, S.Sos.Msi

NIDN. 1005108901

1. **EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si** ()
2. **SARJAN.M, S.Sos.,M.Si** ()
3. **SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si** ()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.J.P., M.Si

NIDN. 1030058402

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LUBUK AMBACANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**HERJUN RUANDA
200411027**

Proposal Penelitian ini berjudul tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui faktor penghambat keterlibatan masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Administrasi Negara, Teori Pemerintah Desa, Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Partisipasi, dan Teori Pembangunan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif, yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil analisis penelitian partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT IN LUBUK AMBACANG VILLAGE, HULU KUANTAN SUB-DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

**HERJUN RUANDA
200411027**

This research proposal is entitled "Community Participation in Development in Lubuk Ambacang Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency". The aim of this research is to determine community participation in development planning in Lubuk Ambacang Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency and to find out the factors inhibiting community involvement in Development Planning in Lubuk Ambacang Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The theories used in this research are State Administration Theory, Village Government Theory, Human Resource Management Theory, Participation Theory, and Development Theory. This research method uses a qualitative approach, which aims to describe phenomena related to the scope of this research. Data and information collection was carried out using interview and documentation techniques. Based on research conducted, it was found that community participation in development planning in Lubuk Ambacang Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. Based on the results of the research analysis, community participation in development in Lubuk Ambacang village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency has been running quite well.

Keywords : Community Participation, Development Planning.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok atau kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang utamanya adalah pembangunan. Kegiatan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan daerah. Selama ini perencanaan pembangunan telah menjadikan pemerintah desa sebagai subjek pembangunan dari pada objeknya.

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia pada hakikatnya adalah terwujudnya masyarakat yang demokratis, karena Negara menyadari bahwa lingkungan yang lebih demokratis mendorong partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, semua potensi yang melekat harus ditemukan, dikembangkan, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan pembangunan. Potensi masyarakat sama, pengetahuan dan kemampuannya perlu ditingkatkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 terdapat 74.754 desa, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 74.957 desa. Selain itu, akan ada 74.961 komunitas pada tahun 2022.

Menurut Hanif Nurcholis (2021: 2) Landasan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik ada di desa, yang menuntut perhatian besar dari pemerintah. Desa,

penduduk, sistem sosial, dan pemerintahannya selalu menarik perhatian dari berbagai pihak.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tujuan kebijakan pembangunan desa. Menurut Hastuty (2021) Disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Memaksimalkan potensi ekonomi lokal sambil menggunakan sumber daya secara berkelanjutan dan dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Bagian ketiga menjelaskan bahwa agar warga desa merasakan kedamaian dan keadilan sosial, pembangunan masyarakat harus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerjasama. Pada hakikatnya tujuan pertumbuhan suatu Negara adalah mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk menciptakan dan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, salah satu tanggung jawab pemerintah desa adalah mendorong pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, dapat dipahami bahwa tanggungjawab pemerintah desa dan warganya dalam memelihara pemerintahan yang menguntungkan dan berhasil termasuk ikut serta dalam peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Desa adalah salah satu tingkat pemerintahan terkecil di Negara Bagian, dan sepanjang sejarahnya. Desa memiliki seluruh masyarakat harus sadar dan terlibat aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Salah satu daerah yang giat melakukan pembangunan adalah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten

Indragiri Hulu yang di bentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, KotaBatam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Tabel 1.1 : Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	12
2.	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	24
3.	Gunung Toar	Kampung Baru	14
4.	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	23
5.	Sentajo Raya	Koto Sentajo	15
6.	Benai	Benai	16
7.	Pangean	Pangean	17
8.	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	15
9.	Kuantan Hilir	Baserah	16
10.	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	14
11.	Inuman	Inuman	14
12.	Cerenti	Cerenti	13
13.	Singingi	Muara Lembu	14
14.	Singingi Hilir	Koto Baru	14
15.	Pucuk Rantau	Pangkalan	10

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah kecamatan, desa, dan jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan dan memiliki 231 Desa. Desa Lubuk Ambacang ini juga termasuk desa yang giat melakukan pembangunan dan berlomba dengan desa lain dalam membangun desa. Tetapi ada juga timbul beberapa permasalahan dari data yang dilihat bahwa tingkat kehadiran dari musyawarah terlihat rendah dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2 : Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat Desa LubukAmbacang dalam Memenuhi Undangan Musyawarah dalam Pembangunan yang di adakan oleh Kepala Desa Lubuk Ambacang Tahun 2021-2024

No	Bulan	Pelaksanaan Musyawarah		
		Undangan	Kehadiran	Persentase%
1.	20 Juli 2021 (Pembangunan masjid)	45	25	50%
2.	15 Desember 2022 (Semenisasi jalan antar dusun anggrek dan dusun dahlia)	45	27	51%
3.	31 Mei 2023 (Membangun sawah)	35	25	70%

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Ambacang 2021-2024

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran musyawarah bahwa tingkat dari kehadiran masyarakat untuk bisa ikut serta dalam menghadiri rapat sangat rendah terlihat di bulan Juli.

Ada pendapat tentang partisipasi dari (Idajati, Pamungkas, & Vely, 2016) yang artinya partisipasi adalah masyarakat yang mengandung arti partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, mulai dari menganalisis permasalahannya, memikirkan bagaimana caranya, menurut (Astuti & Cakradiharja, 2017) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Meskipun pentingnya dan nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah dibahas, masih ada contoh partisipasi masyarakat yang tidak memajukan pembangunan. Di Desa Lubuk Ambacang, tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan fisik berdampak pada pembangunan, sehingga pembangunan fisik infrastruktur yang ada saat ini kurang ideal. Warga Desa Lubuk Ambacang

diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sehingga dapat lebih produktif secara finansial dan operasional. Ketiadaan pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Lubuk Ambacang seringkali memperlambat dan menghambat pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga tidak dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

Tabel 1.3 : Program Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang

Jenis Kegiatan Pembangunan	Terealisasi	Belum Terealisasi
Pembangunan masjid		□
Semenisasi jalan antar dusun anggrek dan dusun dahlia		□
Membangun sawah		□

Sumber data : Kantor Desa Lubuk Ambacang 2021-2024

Dari tabel diatas berikut ini belum sepenuhnya pembangunan terwujud dan belum terlaksana dengan sempurna dan terus bermasalah serta terhambat. Menurut penjelasan tersebut, meskipun keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai pelaksanaan program pembangunan, pelaksanaan pembangunan di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana partisipasi belum terlalu terkonsentrasi. Padahal keterlibatan masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nanti partisipasinya akan dirasakan.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kategori besar pelibatan masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Contoh kegiatan musyawarah desa atau musyawarah masyarakat.

Daftar tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong di Desa Lubuk Ambacang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 1.4 : Jadwal Gotong Royong Kecamatan Hulu Kuantan Desa Lubuk Ambacang

No	Bulan	Jadwal Gotong Royong	Jadwal Masyarakat Yang Melakukan Gotong Royong	Jumlah Masyarakat Yang Diundang
1.	Desember	12/12/2020	20 Orang	45 Orang
2.	Januari	3/01/2021	28 Orang	50 Orang
3.	Maret	15/03/2022	34 Orang	50 Orang

Sumbar Data : Kantor Desa Lubuk Ambacang 2021-2024

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program secara nyata. Partisipasi dalam kegiatan termasuk menginvestasikan waktu, uang, dan pikiran. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi mencakup keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan agar berhasil menjalankan semua bisnis dan operasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut adalah persyaratan untuk kekuatan pendorong dan pemutus yang menentukan dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, ternyata ada warga tertentu yang tidak melakukan kegiatan pembangunan fisik di

Desa Lubuk Ambacang, termasuk memberikan dukungan pemikiran dan materi serta tenaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul tersebut dan memutuskan untuk melakukan kajian tambahan untuk sebuah karya ilmiah (proposal) dengan judul sebagai berikut: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LUBUK AMBACANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis sangat membantu dalam pembuatan artikel penelitian ini, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber data untuk kemajuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai landasan bagi pemerintahan desa di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata, administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada mereka”. Kata “administrasi” juga berasal dari kata “*administratiton*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan.

Menurut Juharni (2015 : 2) Istilah administrasi negarapun mempunyai berbagai macam definisi. Akan tetapi jikalau kita menelaah lebih mendalam tentang definisi-definisi mengenai administrasi negara maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda. Pola pertama adalah memandang bahwa administrasi negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif. Pola kedua memandang bahwa administrasi negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kesemuanya adalah bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

Menurut Willoghby (dalam Juharni, 2015 : 2) administrasi sebagai satu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafiie, 2019 : 4) administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leonard B. White (dalam Syafiie, 2019 : 4) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2019 : 4) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019 : 29). mendefinisikan Administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah diterapkan. Selain itu, Administrasi Negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang di pergunakan untuk mengatur urusan Negara.

Dari pengertian administrasi tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan konsep yang berhubungan dengan lingkungan pemerintah, karena perlu didukung dengan ilmu pengetahuan (*science*) dan berbagai teknik serta prinsip manajemen sehingga seorang administrator dapat menjalankan tugasnya, untuk merealisasikan rencana-rencana melalui proses kerja sama untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara mengkehendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. Selanjutnya Dimock dan Dimock menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintahan, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Menurut Sondang (dalam Syafiie, 2019 : 5), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie, 2019 : 5), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Umar Congge (2017 : 11) administrasi publik atau dulu dikenal administrasi negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. *Goal* dari administrasi publik itu sendiri adalah *public service* atau pelayanan publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang politik, hukum, sosial serta manajemen. Salah satu tugas dari administrasi publik adalah pembuat kebijakan atau *policy maker* yang dikenal dengan kebijakan publik. Artinya para

administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di publik (masyarakat)

Definisi administrasi publik terbagi atas dua, yaitu :

1. Arti sempit, administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif).
2. Arti luas, administrasi negara yang dilakukan oleh ketiga cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Siagian (dalam Andi Nuraini, 2022 : 22) administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara

Menurut Mc Curdy (dalam Mariati Rahman, 2017 : 20) bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara

Menurut Basuki Johannes (2018 : 11) administrasi publik adalah proses kerja sama dari kelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (dalam Harbani Pasalong, 2017 : 3) administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Administrasi negara merupakan sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintah dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan

modern saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut (Budi Nugraha dkk, 2022 : 10).

Menurut Dimock & Dimock (dalam Harbani Pasalong, 2017 : 3) mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek – aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Menurut Rosenbloom (dalam Budi Nugraha, 2022 : 37-38) bahwa administrasi publik yaitu pemanfaatan teori-teori serta proses-proses dari aspek manajemen, aspek politik, maupun aspek hukum untuk dapat memenuhi harapan Pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka menjalankan fungsi- fungsi pengaturan dan pelayanan pada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Alena Henuk-Kacaribu (2020 : 4) sejarah mencatat bahwa bangsa Romawi telah melahirkan Ilmu administrasi yang dibudayakan oleh bangsa Eropa Barat (Eropa Kontinental). Administrasi yang diterapkan di Indonesia adalah hasil adopsi bangsa Belanda yang menjadi salah satu bangsa Eropa Barat. Beberapa negara memiliki istilah administrasi, misalnya menurut bahasa Italia menggunakan kata “*amministrazione*”, bahasa Perancis “*administration*”, bahasa Belanda “*administratie*”, dan bahasa Inggris “*administration* atau *management*”.

Menurut Chrisyanti (dalam Alemina Henuk-Kacaribu, 2020 : 4) berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *administrare* yang

berarti melayani, membantu, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya berasal dari kata *ad (intensive)* dan *ministrare (to serve)* yang berarti melayani, sehingga administrasi dapat diartikan melayani dengan baik.

2.1.2 Teori Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto (dalam Fairus Adira, 2020), desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam disuatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Adapun bagian-bagian dari pemerintah desa terdiri dari:

- A. Kepala Desa
- B. Rukun Warga (RW)
- C. Rukun Tetangga (RT)
- D. Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD)

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Menurut Ndraha (2008 : 8) menyatakan pemerintah desa adalah pengembangan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa.

Menurut Kartohadikusumo (2008 : 16) pemerintah dapat diartikan sebagai Badan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintah

terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Suparmoko (2008 : 61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus menerapkan faktor-faktor wewenang desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Suatu desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Daerah yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sumber daya manusia adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau *Human Resource Departement*.

Menurut Gary Dessler (dalam Saihudin, 2019 : 2) manajemen sumber daya manusia (*human resource management*) adalah proses untuk memperoleh, meneliti, menilai dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.

Menurut Invancevich (dalam Saihudin, 2019 : 2) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi yang dijalankan dalam organisasi dengan maksud memfasilitasi pendayagunaan manusia (karyawan) secara paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu.

Flippo (dalam Saihudin, 2019 : 3) mendefinisikan manajemen personalia (*personel management*) sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu organisasi, dan masyarakat dapat dicapai ia membagi fungsi-fungsi manajemen personalia kedalam fungsi manajerial dan fungsi operasional. Empat fungsi yang pertama (perencanaan sampai dengan pengawasan) adalah fungsi manajerial dan sisanya adalah fungsi operasional manajemen personalia.

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi atau individu.

Menurut Irmayani (2021 : 1) manajemen sumber daya manusia, disingkat dengan MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Menurut Achmad S. Rucky (dalam Irmayani, 2021 : 2) manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Henry Simamora (dalam Ni Wayan 2022 : 2) manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pedayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.

Sedangkan Bejo Siswanto (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 356), menyatakan bahwa faktor-faktor disiplin kerja yaitu :

1. Frekuensi Kehadiran

Merupakan salah satu tolak ukur yang penting untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah memiliki disiplin.

2. Tingkat Kewaspadaan

Pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya.

3. Ketaatan Pada Standar Kerja

Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari.

4. Ketaatan Pada Peraturan Kerja.

Secara sederhana, aturan kerja merupakan sebuah susunan hal hal yang harus dilakukan atau ditaati karyawan selama operasional perusahaan berjalan atau selama mereka berada dalam lingkungan pekerjaan.

5. Etika Kerja

Etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan agar tercipta suasana harmonis dan saling menghargai antar sesama pegawai.

Menurut Simamora (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 7), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Mangkunegara (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 8), manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan,

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pernisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sihotang (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 8), manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan proses perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia untuk tercapainya berbagai tujuan individu, masyarakat, pelanggan pemerintah dan organisasi yang bersangkutan.

Menurut A. F. Stoner (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 8), manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau organisasi dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Menurut Hasibuan (dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016 : 8), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranantenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.

Sedangkan T. Hani Handoko (dalam Gusti Ketut Purnaya, 2016 : 2) mendefenisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan

dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat.

2.1.4 Teori/Konsep Partisipasi

Kata partisipasi (keterlibatan) sering di gunakan dalam diskusi tentang inisiatif, pilihan, hukum, dan layanan pemerintah. Dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan berusaha menjawab kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat, partisipasi memiliki nilai yang signifikan. Pentingnya perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tegaskan oleh Kaho (dalam dirjen PMD, Depdagri, 2008:264) yang menyatakan bahwa perlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, disamping faktor lainnya.

Pengertian partisipasi menurut Theresia et all (2015:196), didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang daluntam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Menurut Lukmanul Hakim (2015:50), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Irene (2015:50) mendefinisikan partisipasi sebagai komitmen mental dan emosional seseorang dalam lingkungan social yang memotivasi mereka untuk mendukung pencapaian tujuan.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan pelibatan masyarakat dalam kelompok sosial yang mengambil bagian yang utamanya adalah pembangunan menurut Adrian Tawai (2017).

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan tujuan dalam mencapai pembangunan bukan hanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat juga dapat merujuk pada kelompok atau alat tertentu.

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Isbandi dkk (dalam Mustanir Ahmad dkk, 2022 : 32) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun pengertian partisipasi berdasarkan para ahli:

Menurut Prasadja (dalam Setiawan Agustina, 2022 : 34) Partisipasi sebagai bentuk kontribusi terorganisasi yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi pemerintah dan masyarakat adalah setara dan saling membutuhkan satu sama lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan.

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022: 56) mengartikan Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Theresia dkk (Rizal, 2014 : 197) Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mengenai :

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Dusseldorp (dalam Astuti dkk, 2019 : 26-27) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Menurut Adisasmita (2016 : 48) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

1. Partisipasi dalam pemikiran

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

2. Partisipasi dengan tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. Partisipasi dengan keahlian

Partisipasi keahlian yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Partisipasi dengan barang

Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

2.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam Pembangunan Desa

Menurut Abu Huraerah (2018 : 102) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut, antara lain :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini berkaitan penentuan alternative dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Dari beberapa definisi partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaankegiatan nya saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

2.1.5 Teori Masyarakat

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “*syaraka*”, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa

Inggris, masyarakat disebut dengan “*society*” yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Adapun pengertian masyarakat berdasarkan para ahli:

Menurut Marx Karl (dalam Yulianti, 2022 : 21) Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan Karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.

Menurut Horton dan Chester (dalam Yulianti, 2022 : 22) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Menurut Soleman (dalam Isdairi, 2021 : 23) Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami suatu wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dn memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, dan mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Menurut Soekanto (dalam Isdairi, 2021 : 23) Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

Menurut (Rukin, 2019 : 15) Tipologi masyarakat adalah pengelompokan masyarakat, baik berdasarkan sumber mata pencarian masyarakat (minsalnya

masyarakat petani, masyarakat perkebunan, masyarakat nelayan, masyarakat hutan), maupun berdasarkan wilayah tinggalnya (masyarakat desa atau *rural community*, dan masyarakat kota atau *urban community*). Dan tipologi masyarakat dapat di tinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - a. Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
 - b. Desa industry, dimana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industry kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
 - c. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan (pantai, laut dan darat)
2. Dari segi pola pemukiman
 - a. *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang disekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.
 - b. *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah ladang mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat

pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektifitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.

- c. *Arrenged isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di Negara-negara Barat Tradisi disini kurang kuat, individualistis lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.
- d. *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan di negara-negara Barat. Tradisi kurang kuat, individualistis menonjol dan juga berorientasi perdagangan.

2.1.6 Teori/Konsep Pembangunan

Secara teoritis ada beberapa definisi dan metode untuk pengertian perkembangan dalam penelitian ilmiah. Konsep ini telah diakui berkali-kali mengalami perubahan pendekatan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para politisi dan akademisi suatu Negara pada periode tertentu. Tetapi hampir tidak ada metode ini yang berhasil menciptakan kondisi ideal. Sifat dari beberapa teknik tersebut, yang berfokus pada mendapatkan hasil dalam jumlah waktu yang paling sedikit dan tidak mengutamakan proses, menjadi salah satu alasan mengapa beberapa pendekatan pengembangan yang telah dibangun mengalami kegagalan. Selain itu persoalan nya baik kepemimpinan politik maupun administrasi pelayanan public tidak benar-benar mengutamakan kebutuhan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya di kenal di Negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar.

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation buildings).

Menurut Amaertya Sen, pembangunan adalah proses untuk meningkatkan akses untuk meningkatkan kebebasan individu, kesempatan, dan pilihan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Menurut Goulet (dalam Soebiato, 2015), gagasan pembangunan didasarkan pada tiga prinsip dasar:

1. Kemandirian, didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, perlindungan, kesehatan, dan keamanan.
2. Harga diri dalam arti memiliki kepercayaan diri untuk menghindari di salah gunakan atau ditindas oleh orang lain.
3. Kebebasan dalam artian kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya.

Prinsip Pembangunan Pedesaan :

1. Pembangunan harus bisa menerapkan prinsip-prinsip:
2. Partisipatif

3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Berkelanjutan

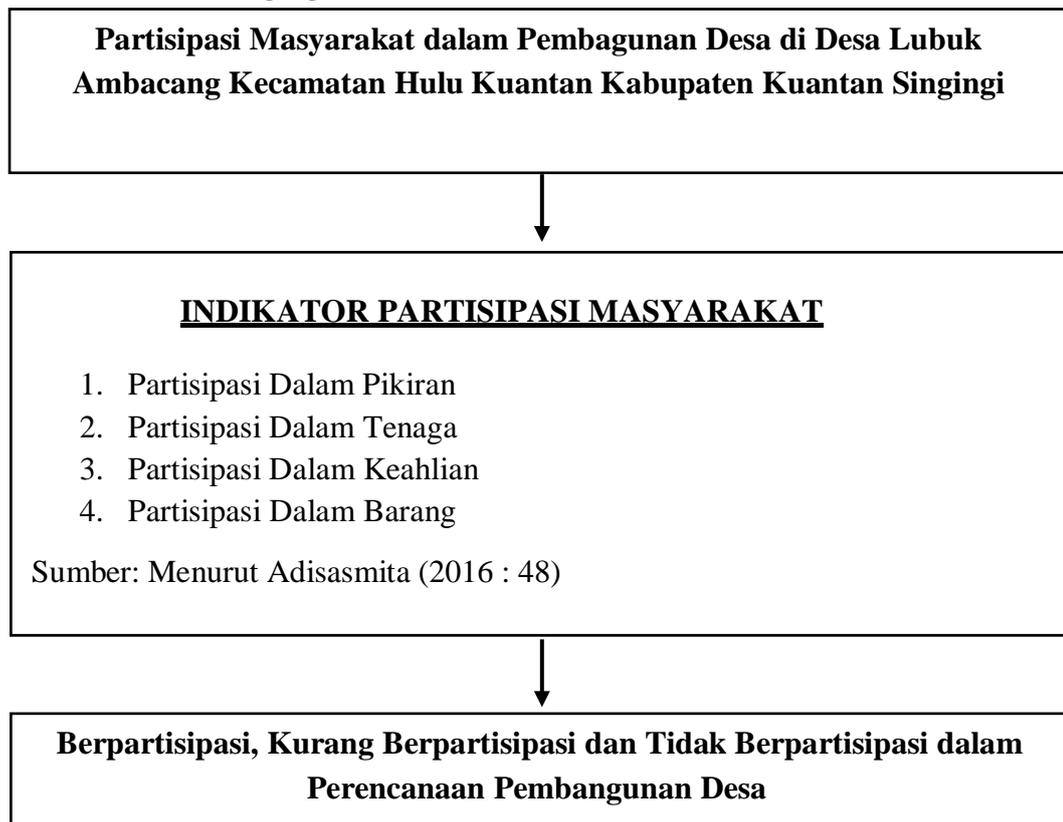
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan sistem yang terencana ke arah perbaikan.

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila persyaratan tersebut telah dapat terpenuhi. Hal ini tidak terlepas dari peranan pemimpinnya pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat desa kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana bimbingan dan pengawasan didasarkan kepada keterangan masyarakat itu sendiri.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan-kegiatan pembangunan desa khususnya secara ekonomi, dimana ketersediaannya prasarana sebagai salah satu bagian penting dari proses produksi, konsumsi dan distribusi dalam sisi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar II. I : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024.

2.3. Definisi Operasional

Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Adapun macam-macam partisipasi sebagai berikut:

2.3.1 Partisipasi dalam pemikiran

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

2.3.2 Partisipasi dengan tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

2.3.3 Partisipasi dengan keahlian

Partisipasi keahlian yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2.3.4 Partisipasi dengan barang

Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

2.4 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Berdasarkan Observasi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Partisipasi Menurut Adisasmita (2016 : 48)	1. Partisipasi Dalam Pemikiran	1. Sumbangsi ide atau gagasan. 2. Menyatakan pendapat.	Ordinal
	2. Partisipasi Dalam Tenaga	1. Keterlibatan sukarela. 2. Aktif dalam kerja bakti.	Ordinal
	3. Partisipasi Dalam Keahlian	1. Arsitek 2. Tukang batu dan Tukang kayu	Ordinal
	4. Partisipasi Dalam Barang	1. Alat kerja atau perkakas 2. Bahan konsumsi	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian survey (penelitian kualitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis), menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif (pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci), dan analisa data kualitatif.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Triningtyas, 2017 : 8) penelitian survey merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel, melalui angket atau *interview* supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi.

Menurut Ramadhan (2021 : 7) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Menurut Sugiyono (2019 : 8) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.

3.2 Informan

Menurut Ibrahim (2021 : 213) informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.

Adapun yang menjadi informan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi , yaitu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 : Jumlah Informan Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan	Jumlah Informan	Persentase %
1	Tokoh Adat	1	10%
2	Tokoh Agama	1	10%
3	Kepala Dusun	2	20%
4	Ketua BPD	1	10%
5	Masyarakat	5	50%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024.

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020:296) sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staff Desa, Tokoh Masyarakat dan pengamatan langsung dilapangan pada objek penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi dari instansi berhubungan dengan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020 : 296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

3.6.1 Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2020 : 297) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020 : 304) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Fenti Hikmawati (2020 : 84) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.6.4 *Triangulasi* (Gabungan)

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja, dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. (Bachtiar, 2021 : 117)

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data berarti merengkuh, memilah hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan dampak relokasi pasar tradisional.

3.7.2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya akan dilakukan penyajian data berupa naratif teks. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Lubuk Ambacang, selanjutnya akan disajikan pada laporan akhir.

3.7.3 Kesimpulan dan Verifikasi Data

Dalam kesimpulan dan verifikasi data akan menjawab kesimpulan awal sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah mendapatkan bukti yang valid dan konsisten pada saat pengumpulan data dilapangan yang akan mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2023-2024																				
		Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agus					
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal	x	x																			
2.	Bimbingan dan Konsultasi Proposal			x	x	x	x	x														
3.	Seminar Proposal							x														
4.	Perbaikan dan Revisi Proposal								x	x												
5.	Penelitian di Lapangan									x	x	x										
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi												x	x	x	x	x					
7.	Ujian Skripsi																x					
8.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																	x	x	x	x	x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Lubuk Ambacang

Lubuk Ambacang adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Desa Lubuk Ambacang pada zaman dahulunya lebih dikenal adalah Kampung Narahan, yang terletak di Sungai Batang Kuantan yang bermuara ke Sungai Kuantan. Asal mula nama Desa Lubuk Ambacang berawal dari sebuah cerita keluarga yang mencari ikan ke sungai Ulo (Sungai Kuantan) dengan menggunakan Perahu dan Rambang (Jala). Pada saat mencari ikan, Rambang tersebut menyangkut kedalam Sungai Batang Kuantan (tepiian mandi). Dengan cepat bapak tersebut menyelami Rambangnya yang tersangkut di kedalaman Sungai Batang Kuantan, pada awalnya bapak itu menganggap hanya kayu biasa, kemudian bapak tersebut merasa heran dan terkejut ternyata dahan kayu tersebut memiliki buah, lalu dahan tersebut diangkat ke dasar air dan dimasukkan kedalam perahu terdapat keanehan pada dahan tersebut dan ternyata yang didapat bapak berupa Buah Ambacang yang tumbuh dalam Lubuh Sungai Ulo, maka dengan kesepakatan adat kampong dijadikan nama Desa tersebut dengan nama Desa Lubuk Ambacang.

Desa Lubuk Ambacang merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Desa ini berada ditengah Kecamatan atau berada di Wilayah ibu Kota Kabupaten lebih kurang 35 Km, serta dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 60 menit dan masyarakatnya terdiri dari beberapa Suku yang cikal bakal warga Desa setempat,

dimana masyarakat hidup dari bercocok tanam, mencari ikan, petani karet dan berburu. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Ambacang sebagai berikut :

1. Suherman (Perode Pertama)
2. Anwar (Perode Pertama)
3. Ardison (Perode Pertama)
4. Iid Siswandi (Perode Pertama)

4.2 Lokasi Geografis

4.2.1 Keadaan Geografis

Desa Lubuk Ambacang merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berada di tengah Kecamatan Hulu Kuantan. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Ambacang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Karing
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Tengah (Sumbar)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sampurago

4.2.2 Luas dan Batas Wilayah

Desa Lubuk Ambacang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan mempunyai luas wilayah seluas 64 Ha. Desa Lubuk Ambacang terletak lebih kurang 35 Km dari pusat kota. Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki orbitasi (jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan) yaitu :

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 0 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0 Menit
3. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 35 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Dahlia, dan Dusun Anggrek, dan pola tata dusun dipengaruhi oleh keadaan geografisnya yang merupakan Desa berupa Perbukitan, Datar dan tepian Sungai atas Permukaan Air Laut. Desa Lubuk Ambacang termasuk daerah Perbukitan dengan Luas wilayah dan wilayah Tepian Sungai. Desa Lubuk Ambacang adalah Desa yang terletak di ibu kota Kecamatan Hulu Kuantan menjadi lintasan beberapa Desa untuk menuju kota Pekanbaru atau pusat Kota Kabupaten.

4.2.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 1300 jiwa. Penduduk Desa Lubuk Ambacang merupakan penduduk berasal dari beberapa suku. Diantaranya Suku Paliang, Suku kampai, Suku Chaniago dan Suku Malayu. Penduduk Desa Lubuk Ambacang sangat berhubungan baik dengan kelompok suku yang ada jumlah penduduk Desa Lubuk Ambacang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 599 orang laki-laki dan 609 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4.2.3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun Jumlah Penduduk Desa Lubuk Ambacang Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-Laki	599	49%
2.	Perempuan	609	51%
Jumlah Total		1.208	100%

Sumber : Data Penduduk Desa Lubuk Ambacang 2024

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah penduduk masyarakat Desa Lubuk Ambacang lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Adapun jumlah laki-laki 599 orang dengan persentase 49% sedangkan jumlah perempuan 609 orang dengan persentase 51%.

4.2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk Desa Lubuk Ambacang berdasarkan umur dapat kita lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1.	0 – 14 tahun	289	24%
2.	15 – 39 tahun	485	40%
3.	40 - 64 tahun	322	27%
4.	65 tahun ke atas	112	9%
Jumlah Total		1208	100%

Sumber : Desa Lubuk Ambacang 2024

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Jaya Kopah yang berusia kurang dari 00 – 14 tahun sebanyak 289 orang (24%), penduduk yang berumur antara 15 – 39 tahun sebanyak 485 orang (40%), penduduk yang berumur antara 40 – 64 tahun sebanyak 322 orang (27%) dan penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 122 orang (9%).

4.2.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari seseorang dan keyakinannya. Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Berikut jumlah penduduk Desa Jaya berdasarkan agama dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1.	Islam	1208	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Hindu	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Khonghucu	-	-
Jumlah Total		1569	100%

Sumber : Desa Lubuk Ambacang 2024

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Lubuk Ambacang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1208 orang dengan persentase 100%.

4.2.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Karena Desa Lubuk Ambacang merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Desa pertanian, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencairan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	602
2.	Nelayan	89
3.	ASN	212
4.	Buruh	301
Jumlah Total		1208

Sumber : Desa Lubuk Ambacang 2024

Dari tabel 4.5 diatas dilihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Jaya Kopah adalah sebagian petani yaitu sebanyak 602 orang. Nelayan 89 orang, ASN 212 orang dan Buruh sebanyak 301 orang.

4.2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf hidupnya selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan lambannya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Desa Lubuk Ambacang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	404
2.	SMP	195
3.	SLTA	284
4.	Sarjana	110
5.	Putus Sekolah	102
6.	Pra Sekolah	113
Jumlah Total		1208

Sumber : Desa Lubuk Ambacang 2024

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Lubuk Ambacang pada tingkatan SD berjumlah 404 orang, pada tingkatan SMP berjumlah 195 orang, pada tingkatan SLTA berjumlah 284 orang, pada tingkatan Sarjana berjumlah 110 orang, kemudian tidak sekolah berjumlah 102 orang dan pra sekolah berjumlah 113 orang.

4.2.5 Sarana dan Prasarana Desa Lubuk Ambacang

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang dari tingkat keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik suatu daerah. Adapun Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Lubuk Ambacang secara garis besar adalah sebagai berikut

Tabel 4.6 Prasarana Desa Lubuk Ambacang

No	Prasarana Desa	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Sekolah	3
3.	Rumah Ibadah	8
4.	Puskesmas	1
4.	Jalan Kecamatan	1
Jumlah Total		14

Sumber : Desa Lubuk Ambacang 2024

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Lubuk Ambacang terdapat Sarana dan Prasarana yaitu Kantor Desa berjumlah 1, terdapat 3 Sekolah, lalu 8 Rumah Ibadah, 1 puskesmas dan 1 Jalan Kecamatan.

4.2.6 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lubuk Ambacang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor PNS Pemerintahan Daerah, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.

4.2.7 Kondisi Pemerintah Desa

4.2.7.1 Pembagian Wilayah Desa

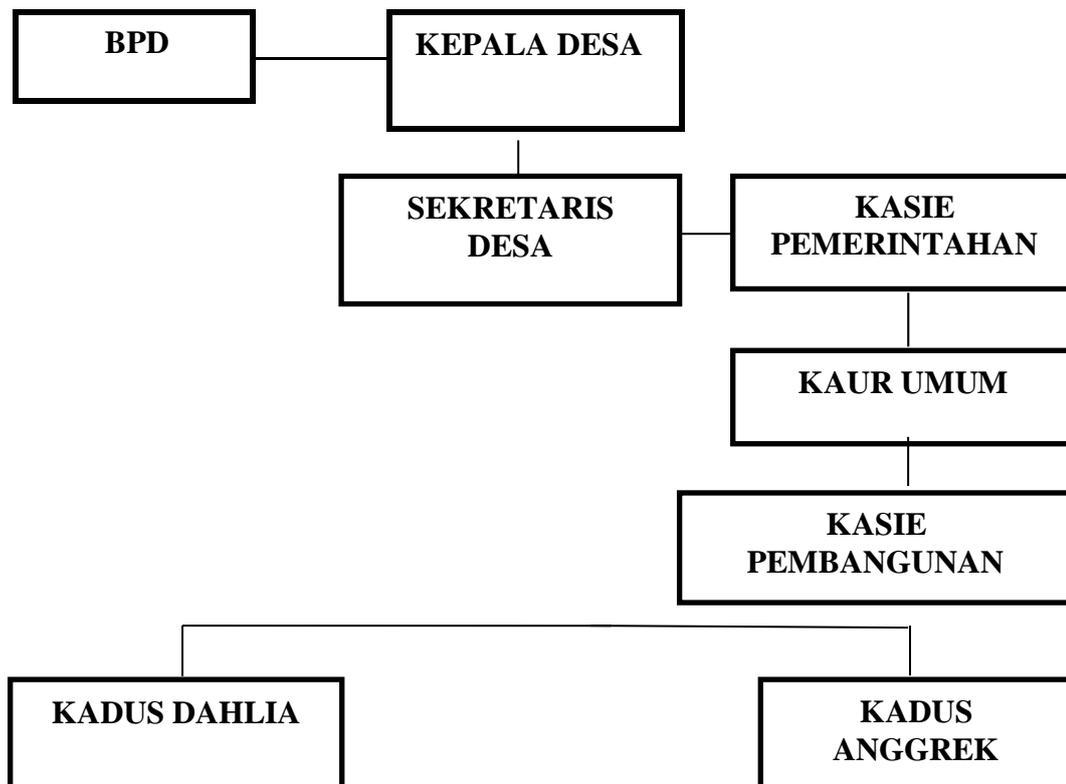
Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial darisebuah kedaulatan. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh

batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Pembagian wilayah Desa Lubuk Ambacang dibagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Dahlia dan Dusun Anggrek. Dimana setiap dusun mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun Anggrek, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

4.3.1 VISI-MISI Desa Lubuk Ambacang

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Lubuk Ambacang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Lubuk Ambacang adalah :

VISI : Terwujudnya Desa Yang Mandiri Di Seluruh Sektor, Adil Sejahtera, Damai.

Beradat Dan Agamis, Serta Meningkatkan Pendidikan Yang Berkualitas.

MISI : Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, meskipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa adalah :

1. Peningkatan dan pencaangan wajib pendidikan mulai dari usia dini (0 s/d 6 tahun)
2. Peningkatan dan pencaangan wajib pendidikan MDA

3. Swadaya dan gotong royong masyarakat pada masing-masing dusun setiap 6 bulan sekali
4. Memberikan pemahaman dengan rapat Desa, perangkat, Tokoh Adat, dan pemuda dalam membangun secara Swadaya dan peningkatan pelayanan bagi perangkat Desa kepada masyarakat setiap 6 bulan sekali.
5. Rapat tahunan (LAP.LPJ, Kas dan pembangunan Desa) dengan tokoh adat, BPD, setiap 1 kali dalam 1 Tahun dan bermitra dengan pihak swasta maupun Desa tetangga
6. Membangun dan membuka sarana umum dengan Swadaya Masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dan informasi dari informan yang berjumlah 10 orang dalam kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara peneliti kepada responden adapun jenis kelamin responden adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1.	Laki-laki	2	20%
2.	Perempuan	8	80%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024.

Berdasarkan tabel V.1 dari tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 10 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dengan persentase 30%, dan jumlah perempuan sebanyak 7 orang dengan persentase 70%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada table V.2 berikut ini:

Tabel V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Responden	Jumlah (Orang)	Persentase %
1.	SD / Sederajat	1	10%
2.	SMP / Sederajat	1	10%
3.	SMA / Sederajat	4	40%
4.	Diploma 3	1	10%
5.	Strata 1	2	20%
6.	Strata 2	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan, SD/sederajat berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, SMP/sederajat berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, SMA/sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 40%, Diploma 3 berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, Strata 1 berjumlah 2 orang dengan persentase 20%, dan Strata 2 berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

5.2 Pembahasan dan Hasil Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.1 Indikator Partisipasi Pikiran

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

5.2.1.1 Sumbangsi Ide Atau Gagasan

Adapun pertanyaannya apakah peserta rapat sering memberikan sumbangsi ide atau gagasannya terkait pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Ambacang ?

Berikut kutipan wawancara dengan dengan Bapak Tokoh Adat Desa Lubuk Ambacang, yaitu Bapak Yuneldi.

“Ya, biasanya peserta rapat itu sering memberikan sumbangan idenya ataukah sekaligus gagasan yang tentunya terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Mata Allo ini.”. (wawancara langsung bersama Tokoh Adat Lubuk Ambacang , Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.00 Wib).

Berikut kutipan wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lubuk Ambacang, yaitu bapak Muslim.

“Ya, mereka memberikan gagasan, karena itu merupakan hal yang penting.” (wawancara langsung bersama Tokoh Agama Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.30 Wib).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa mereka selalu mengemukakan gagasan atau pendapatnya ketika menghadiri rapat atau musrembang desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informandapat diketahui bahwa masyarakat sangat aktif didalam melakukan musyawarah atau rapat dan mereka bersedia memberikan pendapat atau ide yang mereka miliki terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Lubuk Ambacang.

5.1.1.2 Menyatakan Pendapat

Adapun pertanyaan apakah Bapak/Ibu sebagai peserta rapat biasanya menyatakan pendapat atau kritikan yang sifatnya membangun?

Pada indikator menyatakan pendapat, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan Bapak Rika Yuhaspen selaku Ketua BPD Lubuk Ambacang menyatakan bahwa:

“Kadang ada masyarakat (peserta rapat) yang memberikan kritikan, tapi bukan kritikan yang sifatnya ingin menjatuhkan, akan tetapi semata-mata untuk perbaikan Desa Lubuk Ambacang ini kedepannya..” (wawancara langsung bersama Ketua BPD Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 10.00 Wib).

Senada dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yogi Febri Westa selaku Kepala Dusun Dahlia yang menyatakan bahwa:

“Ya, biasa ada yang memberikan gagasan dan biasa pula ada yang memberikan kritikan tetapi itu semata-mata demi perbaikan pembangunan Desa Lubuk Ambacang kedepannya.” (wawancara langsung bersama Kepala Dusun Dahlia Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 10.30 Wib).

Hasil wawancara diatas sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan rapat biasanya ada masyarakat yang memberikan pendapat atau kritikan yang bersifat membangun.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa selain sumbangan ide atau gagasan, peserta rapat juga biasanya memberikan pendapat atau kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan pembangunan Desa Lubuk Ambacang kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat aktif berpartisipasi baik memberikan

masukan atau ide maupun kritikan kepada pemerintah desa mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada partisipasi pikiran, masyarakat sangat aktif didalam melakukan musyawarah atau rapat dan mereka bersedia memberikan pendapat atau ide yang dimiliki terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Lubuk Ambacang. Selain sumbangan ide atau gagasan, peserta rapat juga biasanya memberikan pendapat atau kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan pembangunan Desa Lubuk Ambacang yang kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat aktif berpartisipasi baik memberikan masukan atau ide maupun kritikan kepada pemerintah desa. Peserta rapat juga sering berbagi pengalaman yang dimiliki terkait dengan program yang akan dilaksanakan untuk mendorong keberhasilan dari suatu pembangunan yang akan dilaksanakan.

5.2.2 Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

5.2.2.1 Keterlibatan Sukarela

Adapun pertanyaannya apakah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu secara sukarela atau terpaksa?

Berikut kutipan wawancara dengan dengan Bapak Kepala Dusun Anggrek Desa Lubuk Ambacang, yaitu bapak Ambi Kurniawan menyatakan bahwa :

“Apabila ada kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, mereka dengan sukarela membantu pemerintah Desa Lubuk Ambacang dalam menyelesaikan

pembangunan itu.”(wawancara langsung bersama Kepala Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 11.00 Wib).

Kemudian wawancara dengan Bapak Rika Yuhaspen selaku Ketua BPD menyatakan bahwa:

“Saya kira bahwa keterlibatan masyarakat itu tidak ada paksaan akan tetapi mereka hadir dengan penuh keikhlasan. (wawancara langsung bersama Sekretaris BPD Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 11.30 Wib).

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yuneldi selaku Tokoh Adat menyatakan bahwa:

“Tidak ada yang dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan tapi mereka melakukan dengan kesadaran sendiri.” (wawancara langsung bersama Ketua LKMD Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 12.00 Wib).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa semata-mata bukan karena adanya unsur paksaan, melainkan dengan sukarela. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Ambacang sangat antusias karena mereka sadar akan pembangunan yang dilakukan, sebab merekalah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut.

5.2.2.2 Aktif dalam kerja bakti

Adapun pertanyaan Apakah Bapak/Ibu terlibat secara sukarela, lalu apakah bapak/Ibu akan tetap aktif dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukannya?

Hasil wawancara dengan Bapak Eggi Gustiawan selaku Masyarakat Desa Lubuk Ambacang menyatakan bahwa:

“Ya, walaupun tanpa dibayar kami selaku masyarakat tetap berpartisipasi aktif didalamnya”. (wawancara langsung bersama Kepala Desa Lubuk Ambacang, Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 14.00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kesy Mulya Sari selaku Masyarakat menyatakan bahwa:

“Masyarakat tetap aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan baik mereka dibayar maupun tidak dibayar.” (wawancara langsung dengan Masyarakat Lubuk Ambacang, Hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 Wib).

Senada dengan wawancara yang dilakukan sebelumnya Bapak Rika Yuhaspen selaku Ketua BPD menyatakan bahwa:

“Ya, mereka tetap berpartisipasi secara aktif sampai kegiatan itu selesai.” (wawancara langsung pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2024, Bapak Rika Yuhaspen, Ketua BPD).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa meskipun masyarakat tidak mendapatkan upah, mereka tetap aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan, masyarakat ikhlas membantu pemerintah desa dalam melakukan pembangunan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada partisipasi tenaga, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa semata-mata bukan karena adanya unsur paksaan, melainkan dengan sukarela. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Ambacang sangat antusias karena mereka sadar akan pembangunan yang dilakukan, sebab merekalah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Meskipun masyarakat tidak mendapatkan upah, mereka tetap aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

5.2.3 Partisipasi Dalam Keahlian

Partisipasi keahlian yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan

maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Pada partisipasi keahlian diukur dengan beberapa indikator.

5.2.3.1 Arsitek

Adapun pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Apakah masyarakat yang memiliki keahlian sering memberikan dorongan atau masukan sesuai dengan bidang keahliannya terkait pembangunan yang akan dilaksanakan?

Hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu bapak Rika Yuhaspen menyatakan bahwa :

“Dalam sebuah pekerjaan itu yang paling pertama kita informasikan adalah tukang bila pekerjaan itu seperti rabat beton, maka yang kita hubungi adalah tukang bila pekerjaan itu seperti rabat beton, maka yang kita hubungi adalah tukang batu.” (wawancara langsung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024)

Sementara wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu bapak Panji Maulana mengatakan bahwa :

“Tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu sering bertukar pikiran dengan kita sebelum memulai pekerjaan tersebut.” (wawancara langsung dengan masyarakat pada tanggal 18 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Yuneldi mengatakan bahwa :

“Ya, antara tukang, pemerintah desa dan masyarakat sebelum melakukan kegiatan mereka terlebih dahulu melakukan diskusi, bagaimana yang terbaik yang akan kita lakukan.” (wawancara langsung dengan Tokoh Adat pada tanggal 18 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan suatu pembangunan maka terlebih dahulu dilakukan diskusi antara tukang, pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan langkah yang akan dilakukan dan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan keahlian

tukang yang bersangkutan kemudian dibantu oleh masyarakat dan pemerintah desa.

5.2.3.2 Tukang Batu Dan Tukang Kayu

Adapun pertanyaan Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat yang memiliki keahlian tersebut betul-betul berpartisipasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki?

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Muhammad Rabil mengatakan bahwa :

“Tukang yang terlibat disitu, betul-betul bekerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.”(wawancara langsung dengan masyarakat pada tanggal 18 Juli 2024).

Sementara hasil wawancara dengan Tokoh Agama yaitu bapak Muslim mengatakan bahwa :

“Ya, Mereka betul-betul mencurahkan kemampuannya dalam pekerjaan itu, apalagi kalau pembangunan sarana ibadah.” (wawancara langsung dengan Tokoh Agama pada tanggal 18 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Ibu Gusnita mengatakan bahwa :

“Ya, tukang yang terlibat didalam kegiatan yang dilakukan betul-betul bekerja sesuai dengan keahliannya, baik tukang batu, maupun tukang kayu.” (wawancara langsung dengan masyarakat pada tanggal 18 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, baik tukang batu maupun tukang kayu.

Pada partisipasi keahlian dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan suatu pembangunan maka terlebih dahulu dilakukan diskusi antara tukang, pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan langkah yang akan dilakukan dan

pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan keahlian tukang yang bersangkutan kemudian dibantu oleh masyarakat dan pemerintah desa.

5.2.4 Partisipasi Dalam Barang

Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Pada partisipasi barang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator.

5.2.4.1 Alat Kerja Dan Perkakas

Adapun pertanyaan Bagaimana menurut Bapak/Ibu seperti apakah alat kerja atau perkakas yang biasa disumbangkan oleh masyarakat?

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Dahlia yaitu Yogi Febri Westa mengatakan bahwa :

“Masyarakat yang hadir itu biasanya menyumbangkan alat-alat kerja seperti sekop dan linggis.” (wawancara langsung dengan Kepala Dusun Dahlia Pada Tanggal 18 Juli 2024).

Sementara hasil wawancara dengan Kepala Dusun Anggrek yaitu Bapak Ambi Kurniawan mengatakan bahwa :

“Biasanya masyarakat itu menyumbangkan alat-alat perkakas seperti sekop, gergaji, dan pahat.” (wawancara langsung dengan Kepala Dusun Anggrek pada tanggal 18 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas tergantung dari pembangunan yang akan dilakukan, seperti pada pekerjaan bangunan batu maka masyarakat biasanya menyumbangkan perkakas seperti seperti sekop, ember cor, gerobak dan linggis, apabila pembangunan yang akan dilaksanakan berupa

bangunan kayu, masyarakat biasanya menyumbangkan perkakas seperti gergaji, pahat, bor dan lain-lain.

5.2.4.2 Bahan Konsumsi

Adapun pertanyaan Apakah tanggapan Bapak/Ibu seperti apa saja bahan untuk konsumsi yang biasanya disumbangkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan?

Hasil wawancara langsung dengan Masyarakat yaitu ibu Kesy Mulya Sari mengatakan bahwa :

“Apabila ada warga yang bergotong-royong maka ibu-ibu ikut berpartisipasi dengan menyediakan makanan dan minuman.” (wawancara langsung dengan masyarakat pada tanggal 18 Juli 2024).

Sementara wawancara langsung dengan Kepala Dusun Dahlia yaitu Bapak Yogi Febri Westa mengatakan bahwa :

“Dalam hal sumbangan berupa konsumsi maka yang paling berperan disini adalah ibu-ibu, mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk para pekerja.” (wawancara langsung dengan Kepala Dusun pada tanggal 18 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa untuk sumbangan konsumsi, Ibu-Ibu di Desa Mata Allo berperan aktif dalam menyediakan konsumsi berupa makanan ataupun minuman untuk para pekerja.

5.3 Analisis Hasil Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing

dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Atau, partisipasi juga harus ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka yang ditukar dengan nilai yang sepadan. Partisipasi bisa muncul melalui kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok adat, ataupun satuan-satuan masyarakat yang lebih kecil lainnya. Adanya dukungan dari mereka merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengklasifikasikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi, maka dipastikan suatu daerah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan baik: apapun bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.

Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan akan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi di samping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program-program yang datang dari pemerintah maupun program-program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah

satu diantara berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Dalam bab ini akan disajikan data/informasi yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi yang terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang; dan partisipasi uang.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya merupakan suatu luaran dari partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan merata bagi suatu desa. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi pikiran masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin

besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa pembangunan desa merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Masyarakat memahami dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPD desa Lubuk Ambacang menunjukkan bahwa masyarakat terutama para tokoh-tokoh masyarakat senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama wargadesa mereka. Hal ini selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Kepala BPD untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut, tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri, akan tetapi itu juga merupakan keinginan warga desa secara keseluruhan. Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat ide- ide atau pemikiran mereka dapat menjadi bahan pertimbangan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat di

wujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan hasil pengamatan bahwa kerja bakti atau gotong royong dilakukan sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air (drainase), perbaikan jalan, membersihkan lingkungan, membuat atau memperbaiki jembatan serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Lubuk Ambacang dalam bentuk tenaga dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui informan, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan fisik atau tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam membersihkan saluran air dan pembangunan sarana ibadah. Partisipasi Pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaannya, akan tetapi merawat dan memelihara bangunan itu juga merupakan wujud partisipasi dalam pembangunan.

Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Warga Desa Lubuk Ambacang khususnya kaum laki-laki banyak yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, tukang kayu dan keterampilan teknislainnya yang mereka peroleh dari pengalaman langsung di lapangan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Akan tetapi dengan keahlian yang mereka miliki, dapat dimanfaatkan dan diarahkan secara optimal dalam rangka pengerjaan pembangunan-pembangunan dimasa yang akan datang.

Pada partisipasi keahlian dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan suatu pembangunan maka terlebih dahulu dilakukan diskusi antara tukang, pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan langkah yang akan dilakukan dan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan keahlian tukang yang bersangkutan kemudian dibantu oleh masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi (barang). Tidak semuanya

masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi (barang), bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya. Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Sumbangan barang biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan barang tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan mesjid, jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya.

Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Masyarakat antusias untuk menyumbangkan barang yang dimiliki untuk lancarnya proses pembangunan, masyarakat dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan yang akan dilakukan tersebut. Masyarakat memberikan sumbangan barang secara sukarela beberapa bahan (kayu, paku, pasir dan lain- lain) yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan dalam pengerjaan pembangunan Desa. Dikemukakan oleh Kepala Dusun menyatakan bahwa jika pekerjaan bangunan batu, maka biasanya masyarakat menyumbangkan sekop dan kalau pekerjaan berupa bangunan kayu, maka yang biasanya disumbangkan berupa gergaji, pahat dan bor.

Pada partisipasi barang, masyarakat sering menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas tergantung dari pembangunan yang akan dilakukan, seperti pada pekerjaan bangunan batu maka masyarakat biasanya menyumbangkan perkakas

seperti seperti sekop, ember cor, gerobak dan linggis, apabila pembangunan yang akan dilaksanakan berupa bangunan kayu, masyarakat biasanya menyumbangkan perkakas seperti gergaji, pahat, bor dan lain-lain. Ketika masyarakat memberikan bahan material seperti kayu, paku, pasir, semen dan lain-lain sebagainya yang digunakan sebagai bahan bangunan, mereka tidak meminta imbalan kepada pemerintah desa. Kemudian untuk sumbangsi konsumsi, Ibu-Ibu di Desa Lubuk Ambacang berperan aktif dalam menyediakan konsumsi berupa makanan ataupun minuman untuk para pekerja.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data pembahasan peneliti serta penjabaran dari masing-masing dimensi teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan Cukup Baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Diharapkan agar Kepala Desa dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Lubuk Ambacang guna mendapatkan pembangunan-pembangunan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.
- 6.2.2 Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program pembangunan yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.

- 6.2.3 Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Lubuk Ambacang senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Desa Lubuk Ambacang.
- 6.2.4 Agar Kepala Desa dan aparatnya khususnya Kasi Pembangunan dan Kaur Perencanaan Desa Lubuk Ambacang untuk selalu menertibkan dokumen-dokumen terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lubuk Ambacang, mulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adira, Fairus. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*.

Jogjakarta: Pixelindo

Ahmad, Meustahir dkk, 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam*

Pembangunan. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Bahua, M. I. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan*

Masyarakat.

Congge.Umar . 2017. *Patologi Administrasi Negara*. Makassar. CV

SAH MEDIA.

Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok. PT Raja

Grafindo Persada.

Isdairi, Anwar dkk. 2021. *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan*

Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19. Surabaya

: Scopindo Media Pustaka.

Irmayani, Ni Wayan Dian 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Yogyakarta: Budi Utama.

Johanes, Basuki. 2018. *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan*

Empiris. Depok. PT Raja Grafindo Persada.

Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar. CV SAH MEDIA.

Kacaribu, Alemina Henuk. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi. Unimal Press.

Nugraha, Budi dkk. 2022. *Teori Administrasi*. Padang. Pt Global Eksekutif Teknologi Redaksi

Nugraha, Budi. 2022. *Teori Administrasi*. Padang. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Nuraini , Andi. 2022. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung. Media Sains Indonesia

Pasalong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar. CV SAH MEDIA.

Saihudin, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia.

Syafiie, InuKencana. 2019. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. BumiAksara.

B. Jurnal dan Artikel

Abadi, A. M. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah.*

Jurnal Politik Profetik.

Ivanna, J. 2018. *Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan*

Partisipatif. Jurnal Generasi Kampus.

Ariadi, A. 2019. *Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal.*

Ngongo, Petrus Lende. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam*

Pembangunan. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa

